

**Nama: Desmala Az Zahra**

**NPM: 2313031002**

**Kelas: A**

---

---

## **UAS EKONOMI PENDIDIKAN**

### **1. Efisiensi Anggaran Pendidikan**

**1) Analisis penggunaan anggaran pendidikan pada kasus tersebut berdasarkan konsep efisiensi internal dan eksternal pendidikan.**

**Jawaban:** Berdasarkan konsep efisiensi internal, penggunaan anggaran pendidikan di Kabupaten A belum dapat dikatakan optimal meskipun alokasi dana mencapai 30% dari APBD. Hal ini terjadi karena sebagian besar anggaran lebih difokuskan pada pembangunan gedung sekolah baru, sementara investasi pada aspek yang lebih menentukan kualitas proses pendidikan seperti peningkatan kompetensi guru, pengembangan kurikulum, serta penyediaan media pembelajaran digital masih sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan adanya ketidakseimbangan antara input dan output pendidikan. Meskipun secara fisik fasilitas pendidikan meningkat dan akses sekolah menjadi lebih luas yang ditunjukkan dengan naiknya angka partisipasi sekolah, hal tersebut tidak diikuti oleh peningkatan kualitas hasil belajar siswa. Dengan demikian, efisiensi internal dapat dinilai rendah karena sumber daya yang besar belum mampu menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan secara signifikan.

Sementara itu, dari sisi efisiensi eksternal, kebijakan tersebut juga belum memberikan dampak yang maksimal terhadap manfaat pendidikan bagi masyarakat. Walaupun jumlah siswa yang bersekolah meningkat, kualitas lulusan tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan belum mampu menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan zaman. Lulusan masih cenderung memiliki keterbatasan dalam keterampilan penting seperti literasi, numerasi, kemampuan berpikir kritis, dan penguasaan teknologi. Akibatnya, manfaat sosial dan ekonomi dari pendidikan menjadi kurang optimal karena peningkatan akses tidak diimbangi dengan peningkatan

kualitas. Dengan demikian, efisiensi eksternal dalam kasus ini juga tergolong rendah.

**2) Jelaskan dampak kebijakan tersebut terhadap kualitas sumber daya manusia.**

**Jawabam:** Kebijakan yang lebih menitikberatkan pada pembangunan fisik dibandingkan peningkatan kualitas proses pendidikan memberikan dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Dalam kondisi tersebut, pendidikan memang mampu meningkatkan jumlah peserta didik, tetapi tidak diiringi dengan peningkatan kompetensi yang memadai. Hal ini menyebabkan lulusan pendidikan memiliki daya saing yang rendah, terutama ketika dihadapkan pada kebutuhan dunia kerja yang semakin menuntut keterampilan abad 21 seperti kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan literasi digital. Selain itu, rendahnya kualitas pembelajaran juga berpotensi menghambat produktivitas ekonomi daerah karena tenaga kerja yang dihasilkan belum cukup kompetitif, serta dapat memperlebar kesenjangan sosial karena peningkatan akses pendidikan tidak disertai dengan peningkatan mutu yang merata.

Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, diperlukan perubahan arah kebijakan yang lebih berorientasi pada peningkatan kualitas dibandingkan sekadar perluasan infrastruktur. Pemerintah daerah perlu mengurangi ketergantungan pada pembangunan gedung apabila fasilitas dasar sudah mencukupi, kemudian mengalihkan fokus pada peningkatan kualitas guru melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan kompetensi, dan sistem evaluasi berbasis kinerja. Selain itu, pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman juga menjadi penting, terutama yang menekankan kemampuan berpikir kritis, literasi digital, dan kreativitas siswa. Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran juga perlu diperluas agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan era digital. Di samping itu, evaluasi anggaran tidak hanya seharusnya berfokus pada besarnya dana yang terserap, tetapi juga pada hasil nyata yang dicapai seperti peningkatan hasil belajar dan daya saing lulusan. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan efisiensi internal maupun eksternal pendidikan dapat meningkat secara seimbang dan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas.

## 2. Ketimpangan Akses Pendidikan

### 1) Jelaskan bentuk ketimpangan pendidikan pada kasus tersebut

**Jawab:** Kasus yang terjadi menunjukkan adanya ketimpangan pendidikan yang cukup jelas antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di kota, sekolah dilengkapi dengan laboratorium yang memadai, akses internet cepat, dan tenaga pengajar yang profesional, sehingga siswa memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pembelajaran berkualitas. Sebaliknya, di pedesaan, sekolah menghadapi kekurangan guru, fasilitas yang minim, dan keterbatasan teknologi. Perbedaan ini menghasilkan ketidakseimbangan dalam kesempatan belajar dan kualitas pendidikan yang diterima siswa. Akibatnya, hasil ujian siswa di daerah pedesaan jauh lebih rendah dibandingkan dengan siswa di kota. Bentuk ketimpangan ini tidak hanya terlihat dalam aspek fisik dan teknologi, tetapi juga pada kualitas tenaga pengajar, kurikulum yang dapat diterapkan secara efektif, serta akses terhadap sumber belajar tambahan. Kondisi ini mencerminkan ketidakmerataan distribusi sumber daya pendidikan yang berdampak langsung pada kesenjangan prestasi akademik.

### 2) Analisis dampak ekonomi jangka panjang dari ketimpangan pendidikan

**Jawab:** Ketimpangan pendidikan seperti ini memiliki dampak ekonomi jangka panjang yang serius. Siswa dari wilayah pedesaan yang menerima pendidikan berkualitas rendah cenderung memiliki keterampilan dan kompetensi yang lebih rendah saat memasuki dunia kerja, sehingga produktivitas tenaga kerja di daerah tersebut akan terbatas. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan pendapatan yang semakin lebar antara warga kota dan pedesaan, memperkuat ketimpangan ekonomi, dan menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam jangka panjang, kesenjangan ini juga dapat mengurangi mobilitas sosial, meningkatkan kemiskinan, dan membatasi peluang generasi berikutnya untuk keluar dari siklus keterbatasan sumber daya.

Untuk mengurangi ketimpangan tersebut, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan. Pertama, distribusi guru profesional harus lebih merata dengan memberikan insentif atau program rotasi bagi guru untuk mengajar di daerah terpencil. Kedua, peningkatan fasilitas sekolah di pedesaan

perlu menjadi prioritas, termasuk akses laboratorium sederhana, perpustakaan, dan teknologi digital untuk pembelajaran jarak jauh. Ketiga, pemanfaatan teknologi pendidikan, seperti platform daring yang interaktif dan modul digital, dapat membantu siswa di daerah terpencil untuk mengakses konten pendidikan berkualitas. Keempat, program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi guru di daerah kurang terlayani harus diperkuat agar metode pembelajaran lebih efektif. Dengan pendekatan ini, ketimpangan akses pendidikan dapat diminimalkan, kualitas pembelajaran meningkat, dan secara bertahap kesenjangan ekonomi dan sosial antara wilayah perkotaan dan pedesaan dapat dikurangi.

### **3. Pengangguran Terdidik**

#### **1) Analisis penyebab pengangguran terdidik berdasarkan teori human capital**

**Jawab:** Berdasarkan teori human capital, pendidikan dipandang sebagai investasi untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas individu agar memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi di pasar kerja. Dalam kasus Kota B, meningkatnya jumlah lulusan perguruan tinggi seharusnya diikuti oleh peningkatan kualitas tenaga kerja yang siap pakai. Namun, pengangguran terdidik tetap terjadi karena investasi pendidikan tidak sepenuhnya menghasilkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara output pendidikan dan demand pasar kerja. Banyak lulusan memiliki ijazah, tetapi tidak memiliki kompetensi praktis yang dibutuhkan dunia kerja, seperti keterampilan teknis, problem solving, komunikasi profesional, dan kemampuan adaptasi teknologi. Dalam perspektif human capital, kondisi ini menunjukkan bahwa return dari investasi pendidikan menjadi rendah karena kualitas modal manusia yang dihasilkan tidak sebanding dengan tuntutan pasar kerja.

#### **2) Jelaskan hubungan antara pendidikan dan pasar kerja pada kasus tersebut**

**Jawab:** Hubungan antara pendidikan dan pasar kerja dalam kasus ini menunjukkan adanya kesenjangan atau mismatch. Secara ideal, pendidikan berfungsi sebagai pemasok tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Namun, pada kasus Kota B, sistem pendidikan tinggi belum sepenuhnya selaras dengan dinamika pasar kerja yang terus berubah. Dunia industri menuntut keterampilan yang lebih aplikatif dan berbasis praktik, sementara proses pendidikan

masih cenderung teoritis. Akibatnya, lulusan tidak langsung terserap oleh pasar kerja atau bahkan bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan jurusan mereka.

Untuk meningkatkan relevansi lulusan, perguruan tinggi perlu melakukan penyesuaian kurikulum agar lebih berbasis kompetensi dan kebutuhan industri, bukan hanya teori akademik. Kerja sama antara kampus dan dunia industri juga perlu diperkuat melalui program magang, praktik kerja lapangan, dan proyek kolaboratif yang memungkinkan mahasiswa mendapatkan pengalaman nyata sebelum lulus. Selain itu, pengembangan soft skills seperti komunikasi, kerja tim, dan kemampuan berpikir kritis perlu menjadi bagian penting dari proses pembelajaran. Perguruan tinggi juga perlu lebih responsif terhadap perubahan teknologi dan tren pasar kerja dengan memperbarui program studi secara berkala. Dengan langkah tersebut, kesenjangan antara pendidikan dan pasar kerja dapat diperkecil sehingga pengangguran terdidik dapat ditekan secara signifikan.

#### **4. Kenaikan Biaya Pendidikan**

##### **1) Analisis kasus tersebut berdasarkan konsep pendidikan sebagai barang publik dan barang privat**

**Jawab:** Kasus kenaikan biaya kuliah di universitas swasta dapat dianalisis melalui perspektif pendidikan sebagai barang publik dan barang privat. Pendidikan memiliki karakteristik ganda. Sebagai barang publik, pendidikan memberikan manfaat tidak hanya bagi individu yang menempuh pendidikan, tetapi juga bagi masyarakat luas, seperti meningkatnya kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, dan penguatan stabilitas sosial. Namun, ketika pendidikan ditawarkan oleh universitas swasta dengan biaya tinggi, aspek pendidikan sebagai barang privat menjadi lebih dominan, karena manfaat langsung dan aksesnya sangat tergantung pada kemampuan individu atau keluarga untuk membayar. Kenaikan 25% biaya kuliah meningkatkan kualitas fasilitas dan layanan akademik, namun sekaligus memperbesar beban finansial bagi keluarga berpenghasilan rendah. Hal ini menunjukkan ketegangan antara tujuan publik pendidikan meningkatkan kesejahteraan kolektif dan realitas privat yang membatasi akses berdasarkan kemampuan ekonomi.

**2) Jelaskan dampak sosial ekonomi dari kenaikan biaya pendidikan.**

**Jawab:** Kenaikan biaya pendidikan memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Secara sosial, biaya tinggi dapat membatasi akses bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah, sehingga menimbulkan kesenjangan kesempatan pendidikan dan memperkuat ketimpangan sosial. Hal ini juga berpotensi menurunkan keragaman sosial di kampus dan mengurangi mobilitas sosial, karena pendidikan tinggi menjadi lebih sulit dijangkau oleh kelompok ekonomi kurang mampu. Secara ekonomi, peningkatan biaya dapat mendorong mahasiswa untuk bekerja paruh waktu atau menunda kuliah, yang pada gilirannya dapat memengaruhi fokus belajar dan produktivitas akademik. Selain itu, dalam jangka panjang, apabila kelompok tertentu terpaksa mengurangi akses ke pendidikan berkualitas, potensi peningkatan kualitas tenaga kerja dan produktivitas nasional dapat terbatas. Di sisi universitas, meskipun kenaikan biaya memungkinkan peningkatan fasilitas, manfaatnya tidak seimbang jika justru mengurangi akses bagi sebagian besar mahasiswa.

**3) Apakah pemerintah perlu melakukan intervensi? Jelaskan alasannya**

**Jawab:** Pemerintah perlu mempertimbangkan intervensi untuk memastikan pendidikan tetap dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Intervensi bisa berupa pemberian subsidi, bantuan beasiswa, atau sistem pembiayaan pendidikan berbasis kebutuhan ekonomi, sehingga mahasiswa dari keluarga kurang mampu tetap memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi. Alasan intervensi ini sejalan dengan prinsip pendidikan sebagai barang publik, di mana pemerintah bertanggung jawab memastikan pendidikan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat luas. Tanpa intervensi, kenaikan biaya yang tidak terkendali berpotensi memperkuat kesenjangan sosial dan menurunkan kualitas SDM secara nasional. Dengan dukungan pemerintah, universitas dapat tetap meningkatkan fasilitas dan layanan akademik, sementara akses pendidikan tetap adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

**5. Digitalisasi Pembelajaran**

**1) Analisis masalah tersebut menggunakan konsep biaya pendidikan dan *opportunity cost***

**Jawab:** Kasus digitalisasi pembelajaran pasca pandemi menunjukkan bahwa transformasi pendidikan ke arah digital membawa konsekuensi berupa peningkatan biaya pendidikan bagi siswa dan keluarga. Biaya pendidikan dalam konteks ini tidak hanya mencakup biaya langsung seperti uang sekolah, tetapi juga biaya tambahan seperti pembelian perangkat digital, kuota internet, dan biaya pemeliharaan teknologi. Bagi keluarga kurang mampu, biaya ini menjadi beban yang cukup berat sehingga menghambat partisipasi siswa dalam proses pembelajaran.

Selain itu, konsep opportunity cost juga sangat relevan dalam kasus ini. Ketika keluarga harus memilih antara membeli perangkat dan kuota internet untuk pendidikan anak atau memenuhi kebutuhan dasar lainnya seperti pangan dan kesehatan, maka ada biaya peluang yang harus dikorbankan. Dalam banyak kasus, keluarga berpenghasilan rendah cenderung mengutamakan kebutuhan dasar sehingga siswa kehilangan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran secara optimal. Akibatnya, meskipun sistem pendidikan sudah berbasis digital, tidak semua siswa dapat mengaksesnya secara setara karena adanya keterbatasan ekonomi yang menimbulkan ketimpangan dalam kesempatan belajar.

## **2) Jelaskan dampak kesenjangan digital terhadap kualitas pendidikan**

**Jawab:** Kesenjangan digital memiliki dampak yang cukup serius terhadap kualitas pendidikan. Siswa yang tidak memiliki akses terhadap perangkat dan internet akan mengalami keterlambatan dalam menerima materi pembelajaran, kesulitan dalam mengerjakan tugas, serta terbatasnya interaksi dengan guru dan teman sekelas. Hal ini menyebabkan penurunan partisipasi belajar yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya capaian akademik. Dalam jangka panjang, kesenjangan ini dapat memperlebar disparitas kualitas pendidikan antara siswa dari keluarga mampu dan tidak mampu, serta menghambat pemerataan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, kesenjangan digital juga dapat mengurangi motivasi belajar siswa karena mereka merasa tertinggal dibandingkan teman-temannya yang memiliki akses lebih baik.

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan kebijakan yang berpihak pada pemerataan akses teknologi pendidikan. Pemerintah dapat menyediakan subsidi perangkat belajar seperti laptop atau tablet bagi siswa kurang mampu serta memberikan bantuan kuota internet secara berkala. Selain itu, sekolah dapat

menyediakan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi secara bersama-sama melalui laboratorium komputer atau pusat belajar digital yang dapat diakses siswa secara gratis. Pengembangan jaringan internet di daerah terpencil juga perlu diperkuat agar akses tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan. Di samping itu, model pembelajaran hybrid yang menggabungkan metode daring dan luring dapat menjadi solusi agar siswa tetap dapat belajar meskipun memiliki keterbatasan akses digital. Dengan kebijakan yang tepat, digitalisasi pendidikan dapat berjalan lebih inklusif dan tidak memperlebar kesenjangan sosial dalam akses pendidikan.